

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan fundamental bagi setiap negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tingkat pengangguran (Sukirno, 2016). Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian, yang berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, serta munculnya berbagai permasalahan sosial seperti kriminalitas, ketimpangan sosial, dan konflik horizontal. Oleh karena itu, pengangguran tidak hanya menjadi persoalan ketenagakerjaan, melainkan juga mencerminkan stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan suatu negara maupun daerah (Sukirno, 2013).

Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius dalam menekan angka pengangguran terbuka. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja tidak selalu diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang sebanding. Di banyak wilayah, jumlah pencari kerja terus meningkat, namun tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia—terutama dalam hal pendidikan—menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Di sisi lain, kebijakan penetapan upah minimum kadang berdampak dua sisi; meskipun bertujuan meningkatkan

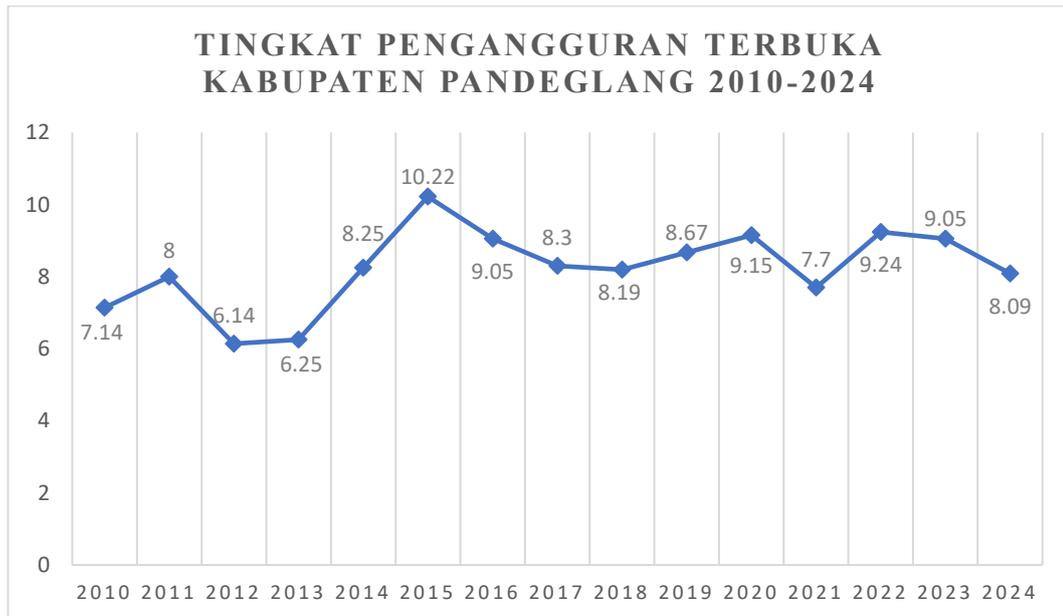
kesejahteraan buruh, namun juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan Teori Dualisme Ekonomi yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis (1954). Menurut teori ini, perekonomian di negara berkembang terdiri dari dua sektor, yakni sektor tradisional yang padat tenaga kerja dan sektor modern yang padat modal. Pengangguran terjadi ketika sektor modern tidak mampu menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor tradisional. Dalam konteks ini, pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi serta rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan surplus tenaga kerja di sektor informal. Sementara itu, sektor formal sering kali tidak dapat menyerap tenaga kerja karena keterbatasan keterampilan dan tekanan biaya seperti kenaikan upah minimum. Model Lewis ini menjelaskan bahwa pengangguran bukan hanya akibat kekurangan lapangan kerja, tetapi juga akibat ketidakseimbangan struktural antara sektor dan kualitas tenaga kerja. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar konseptual untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pendidikan, dan upah minimum memengaruhi tingkat pengangguran terbuka, khususnya di daerah berkembang seperti Kabupaten Pandeglang.

Fenomena tersebut secara nyata terlihat di Kabupaten Pandeglang, salah satu daerah di Provinsi Banten, yang menghadapi tantangan serupa. Kabupaten ini memiliki karakteristik demografis dengan jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.189.373 jiwa dan meningkat menjadi lebih dari 1,3 juta jiwa pada tahun 2024. Peningkatan

jumlah penduduk, terutama usia produktif, seharusnya menjadi modal pembangunan. Namun, tanpa diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai, kondisi ini justru memicu peningkatan angka pengangguran terbuka.

Gambar 1. 1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Pada awal tahun 2010, TPT tercatat sebesar 7,14 persen dan meningkat menjadi 8 persen pada tahun 2011. Namun, peningkatan ini tidak berlanjut secara konsisten, karena pada tahun 2012 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 6,14 persen, diikuti oleh kenaikan tipis menjadi 6,25 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014, TPT mengalami lonjakan kembali ke angka 8,25 persen, menandai awal dari tren peningkatan tajam yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, n.d.).

Pada tahun 2015, TPT tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 10,22 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 8,3 persen dan

8,19 persen. Namun, angka ini kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 8,67 persen dan 9,15 persen. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2021, ketika TPT mencapai titik terendah selama satu dekade terakhir, yakni 7,7 persen. Meskipun begitu, pada dua tahun berikutnya, yakni tahun 2022 dan 2023, angka pengangguran kembali meningkat menjadi 9,24 persen dan 9,05 persen. Terakhir, pada tahun 2024, TPT mengalami penurunan menjadi 8,09 persen (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pola naik-turun ini menunjukkan bahwa pengangguran di Kabupaten Pandeglang tidak mengalami tren penurunan yang stabil, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kebijakan ketenagakerjaan yang belum konsisten. Kenaikan TPT pasca-pandemi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penciptaan lapangan kerja, kesesuaian keterampilan tenaga kerja, serta daya serap sektor usaha terhadap penduduk usia produktif.

Salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi pengangguran di Kabupaten Pandeglang adalah jumlah penduduk. Selama kurun waktu 2015–2024, jumlah penduduk di Kabupaten Pandeglang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.228.000 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 1.325.950 jiwa, menjadikannya angka tertinggi selama periode tersebut. Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan ini tentunya juga berdampak pada peningkatan angkatan kerja. Setiap penambahan penduduk usia produktif yang tidak diiringi dengan perluasan lapangan kerja akan meningkatkan risiko pengangguran terbuka. Dengan kata lain, semakin besar jumlah penduduk namun lapangan kerja stagnan, maka semakin tinggi potensi pengangguran di suatu wilayah (Junaidi, 2019).

Selain faktor demografi, tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pandeglang juga masih menjadi kendala utama. Indikator seperti rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah ini belum optimal (Todaro, M. P., & Smith, 2015:118) . Ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja formal. Sebagian besar tenaga kerja akhirnya hanya mampu terserap di sektor informal, yang cenderung tidak stabil dan berproduktivitas rendah.

Faktor lain yang juga memengaruhi adalah kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin penghasilan yang layak bagi pekerja. Namun dalam praktiknya, kenaikan UMK sering kali menimbulkan dilema. Di satu sisi, upah minimum yang meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun di sisi lain, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kebijakan ini dapat menambah beban biaya produksi sehingga memengaruhi kapasitas mereka dalam merekrut atau mempertahankan tenaga kerja (Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2010).

Permasalahan utama yang timbul dari fenomena tersebut adalah masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pandeglang. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk usia kerja, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, serta belum optimalnya kebijakan upah minimum dalam mendukung dinamika pasar kerja lokal. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, menurunkan produktivitas tenaga kerja, serta melemahkan daya saing daerah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris yaitu :

“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Pandeglang”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi ketenagakerjaan dan pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pandeglang?
2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pandeglang?
3. Apakah Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pandeglang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.
3. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian berfokus pada besarnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang yang menggunakan tiga variabel bebas yakni jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan upah minimum kabupaten di Kabupaten Pandeglang dengan kurun waktu 15 tahun.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai wawasan pengetahuan mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Pengangguran di Kabupaten Pandeglang, bagi peneliti sendiri (khususnya) dan bagi peneliti selanjutnya (umumnya).
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.
3. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi.